

Nama: Najwa Ayudia Aura Rachim

NPM: 2313031027

Kelas: A

Matkul: Ekonomi Pendidikan

CASE STUDI

1. Analisis Struktur Pengeluaran

Apakah struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya sudah efisien ?

Struktur belanja pendidikan di Provinsi Nusantara Raya dapat dikatakan belum efisien. Meskipun alokasi pendidikan telah mencapai 22% dari APBD, sebagian besar anggaran (68%) masih digunakan untuk gaji dan tunjangan guru. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana habis untuk biaya rutin sehingga ruang fiskal untuk peningkatan mutu pendidikan menjadi terbatas. Ketidakefisienan juga terlihat dari hasil pendidikan yang masih rendah, yaitu skor literasi dan numerasi di bawah rata-rata nasional, ketimpangan kualitas sekolah antara kota dan desa, serta distribusi guru yang tidak merata. Artinya, besarnya anggaran belum menghasilkan output pendidikan yang optimal.

Bagian mana yang perlu direalokasi ? Mengapa ?

Beberapa bagian yang perlu direalokasi adalah:

- 1) Mengurangi porsi belanja administrasi dan lainnya (12%) melalui efisiensi birokrasi dan digitalisasi layanan pendidikan.
- 2) Meningkatkan alokasi untuk pengembangan kualitas guru, seperti pelatihan, sertifikasi, dan insentif berbasis kinerja.
- 3) Meningkatkan investasi pada infrastruktur digital karena akses teknologi masih sangat terbatas, terutama di daerah terpencil.
- 4) Menambah program bantuan siswa berbasis kebutuhan agar kelompok kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang lebih baik.

Realisasi anggaran sebaiknya lebih berorientasi pada peningkatan hasil belajar daripada sekadar pembiayaan operasional.

2. Analisis Sumber Pembiayaan

Apakah pembiayaan masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah ?

Ya, pembiayaan pendidikan masih relatif bergantung pada pemerintah daerah karena sebagian besar sumber dana berasal dari APBD. Ketergantungan yang tinggi dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk melakukan inovasi dan mempercepat pembangunan pendidikan, terutama ketika kondisi fiskal daerah mengalami tekanan.

Perluah melibatkan sektor swasta atau skema pembiayaan alternatif ?

Perlu. Keterlibatan sektor swasta dapat membantu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan tanpa membebani APBD secara berlebihan. Model pembiayaan yang dapat diterapkan antara lain:

- 1) Public-Private Partnership (PPP) untuk pembangunan infrastruktur sekolah dan jaringan internet.
- 2) Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk penyediaan laboratorium, perangkat teknologi, dan beasiswa.
- 3) Dana abadi pendidikan daerah yang dikelola secara profesional untuk menjamin keberlanjutan pembiayaan.
- 4) Kemitraan dengan perguruan tinggi dan industri dalam program pelatihan guru serta pengembangan keterampilan digital siswa.

3. Perbandingan dengan Negara OECD

Elemen apa dari praktik negara OECD yang realistis diadopsi ?

Beberapa praktik OECD yang realistis diterapkan adalah:

- 1) Performance-Based Budgeting (PBB), yaitu penganggaran yang dikaitkan dengan capaian kinerja pendidikan.
- 2) Pendanaan berbasis kebutuhan siswa (needs-based funding), sehingga daerah terpencil dan siswa kurang mampu memperoleh alokasi lebih besar.

- 3) Peningkatan kualitas guru secara berkelanjutan melalui pelatihan rutin dan evaluasi kompetensi.
- 4) Sistem evaluasi berbasis data untuk memantau hasil belajar, kehadiran guru, dan efektivitas penggunaan anggaran.

Apa tantangan implementasinya di konteks Indonesia ?

Tantangan utama dalam mengadopsi praktik negara OECD di Indonesia adalah kualitas data pendidikan yang masih belum merata antar daerah sehingga menyulitkan proses perencanaan dan evaluasi kebijakan secara akurat. Selain itu, kapasitas manajemen pendidikan di setiap daerah juga berbeda-beda, sehingga kemampuan dalam mengelola anggaran dan melaksanakan program reformasi tidak sama. Implementasi reformasi juga sering menghadapi resistensi dari berbagai pihak karena adanya perubahan dalam sistem penganggaran dan evaluasi kinerja yang telah lama diterapkan. Di samping itu, keterbatasan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil, menjadi hambatan dalam penerapan sistem pendidikan berbasis teknologi dan data. Faktor geografis Indonesia yang luas dan terdiri atas banyak pulau juga menyulitkan pemerataan distribusi guru serta penyediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah.

4.

PROPOSAL REFORMASI PENDIDIKAN

A. Latar Belakang

Provinsi Nusantara Raya masih menghadapi berbagai tantangan dalam sektor pendidikan. Beberapa permasalahan yang menonjol antara lain rendahnya capaian literasi dan numerasi peserta didik, kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta keterbatasan akses teknologi dan internet di sejumlah wilayah. Di sisi lain, meskipun alokasi anggaran pendidikan telah mencapai 22% dari APBD, sebagian besar dana tersebut masih digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan guru sehingga ruang fiskal untuk program peningkatan mutu pendidikan relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pembiayaan pendidikan yang lebih terarah dengan menekankan efektivitas penggunaan anggaran, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan hasil belajar siswa. Reformasi ini mengacu pada praktik-praktik yang diterapkan di negara-negara OECD, seperti penganggaran berbasis kinerja, pendanaan sesuai kebutuhan peserta didik, peningkatan profesionalisme guru, dan pengambilan keputusan berbasis data.

B. Tujuan Reformasi

Program reformasi pembiayaan pendidikan bertujuan untuk:

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik.
2. Mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.
3. Mendorong peningkatan kompetensi serta pemerataan tenaga pendidik.
4. Mempercepat penerapan teknologi dalam proses pendidikan.
5. Mewujudkan pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

C. Program Reformasi Pembiayaan Pendidikan Lima Tahun

1. Penataan Struktur Anggaran Pendidikan

No	Komponen Belanja	Kondisi Awal	Target Reformasi
1	Gaji dan Tunjangan Guru	68%	55%
2	Insfrastuktur dan Digitalisasi	12%	20%
3	Bantua / Beasiswa dan lain-lain	8%	15%
4	Pelatihan Kualitas Guru	0%	7%
5	Administrasi dan lainnya	12%	3%
Total		100%	100%

Langkah-Langkah Strategis

- Melakukan pemerataan penempatan guru dari daerah yang kelebihan tenaga pendidik ke wilayah yang masih kekurangan.
- Mengurangi pengeluaran administrasi yang kurang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan.
- Menerapkan sistem penganggaran berbasis hasil atau kinerja.
- Menyalurkan pendanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan sekolah dan karakteristik peserta didik.

2. Program Penguatan Kompetensi Guru

Guru merupakan unsur utama dalam keberhasilan pendidikan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas guru menjadi fokus penting dalam reformasi ini melalui beberapa program berikut:

a. Pengembangan Kemampuan Digital

Guru Pemerintah daerah akan menyediakan pelatihan yang berfokus pada pemanfaatan teknologi pendidikan agar guru mampu menggunakan berbagai media digital, platform pembelajaran daring, serta metode pembelajaran inovatif.

- b. **Sertifikasi dan Penilaian Berkala**
Setiap guru akan mengikuti sertifikasi kompetensi dan evaluasi kinerja secara rutin untuk memastikan kualitas pengajaran terus berkembang sesuai standar yang ditetapkan.
- c. **Pemberian Insentif bagi Guru di Daerah Terpencil**
Guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil akan memperoleh tambahan tunjangan, dukungan fasilitas tempat tinggal, serta peluang pengembangan karier yang lebih baik guna mendorong pemerataan tenaga pendidik.
- d. **Program Agen Perubahan**
Pendidikan Guru-guru dengan kinerja unggul akan ditunjuk sebagai mentor dan penggerak inovasi di sekolah masing-masing sehingga dapat mendorong terciptanya budaya belajar yang lebih kreatif dan kolaboratif.

3. Program Transformasi Digital Sekolah

Digitalisasi pendidikan dilakukan untuk memperluas akses pembelajaran sekaligus mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.

- a. **Penyediaan Jaringan Internet Sekolah**
Pemerintah akan memperluas cakupan internet hingga menjangkau sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil sehingga seluruh warga sekolah dapat mengakses sumber belajar digital.
- b. **Bantuan Perangkat Teknologi**
Sekolah akan memperoleh dukungan berupa komputer, tablet pembelajaran, proyektor, dan berbagai perangkat multimedia yang menunjang proses belajar mengajar.
- c. **Pengembangan Sistem Pembelajaran Daring**
Pemerintah daerah akan membangun platform pembelajaran digital atau Learning Management System (LMS) yang memungkinkan guru dan siswa mengakses materi, tugas, serta evaluasi pembelajaran secara online.
- d. **Modernisasi Administrasi Sekolah**
Berbagai proses administrasi akan dialihkan ke sistem digital, seperti absensi elektronik, pengelolaan nilai secara online, dan pelaporan berbasis data guna meningkatkan efisiensi serta transparansi pengelolaan sekolah.

4. Monitoring dan Evaluasi

A. Monitoring Program

Aspek yang Dipantau	Metode Monitoring
Penggunaan Anggaran	Audit dan Laporan Digital berbasis Kinerja
Kinerja Sekolah	Pengukuran Capaian literasi dan numerasi
Distribusi Guru	Pemantauan data tenaga pendidik per wilayah
Infrastuktur Digitali	Evaluasi kesiapan teknologi sekolah
Bantuan Pendidikan	Verifikasi penerima berdasarkan kondisi sosial ekonomi

Indikator Keberhasilan

- Meningkatnya capaian literasi dan numerasi siswa.
- Berkurangnya kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah.
- Distribusi guru yang lebih merata.
- Meningkatnya akses internet dan penggunaan teknologi pembelajaran.
- Penggunaan anggaran pendidikan yang lebih efisien.

B. Evaluasi Program

a. Evaluasi Berkala Semester dan Tahunan

Evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan setiap akhir tahun untuk mengukur perkembangan berbagai program reformasi, termasuk peningkatan kualitas guru, pemerataan tenaga pendidik, digitalisasi sekolah, serta efektivitas penggunaan anggaran.

b. Pembentukan Tim Penilai Independen

Pemerintah daerah akan membentuk tim independen yang terdiri atas akademisi, praktisi pendidikan, auditor, dan unsur masyarakat untuk melakukan penilaian secara objektif terhadap pelaksanaan reformasi.

c. Pemanfaatan Sistem Evaluasi Berbasis Data

Seluruh proses evaluasi akan menggunakan sistem data terintegrasi yang memuat informasi mengenai kehadiran guru dan siswa, hasil belajar, kondisi sarana prasarana, distribusi guru, serta penggunaan anggaran pendidikan.

d. Evaluasi sebagai Dasar Penyusunan Anggaran

Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam menentukan alokasi anggaran pada tahun berikutnya. Program yang terbukti efektif akan mendapatkan dukungan dana yang lebih besar, sedangkan program yang kurang efektif akan diperbaiki atau disesuaikan.

D. Kesimpulan

Reformasi pembiayaan pendidikan di Provinsi Nusantara Raya perlu difokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, serta pemanfaatan teknologi secara optimal. Melalui penataan kembali struktur anggaran, peningkatan kompetensi guru, percepatan digitalisasi sekolah, serta penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data, diharapkan tercipta sistem pendidikan yang lebih berkualitas, efisien, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.